



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP**

Jabatan : **BUPATI MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, 2025

hu. ds. .PIHAK KEDUA,

ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Peningkatan Penanaman Modal | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 1.000.000.000.000 |
| 2. | Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah | Nilai realisasi investasi di daerah | 150.000.000.000 |
| 3. | Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPSTP yang bersih, Akuntabel dan Profesional | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik | *4 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.379.015.050,00 | DAU |
| 2 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 138.050.200,00 | DAU |
| 3 | Program Promosi Penanaman Modal | 153.000.000,00 | DAU |
| 4 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 7.437.000,00 | DAU |
| 5 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 333.992.650,00 | DAK |
| 6 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 5.311.000,00 | DAU |

Tondano , 2025

 **BUPATI MINAHASA**

ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALICE BARBARA LUMANAUW, SH
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si



ALICE BARBARA LUMANAUW, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan | 13 Dok |
| 2. | Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase pengelolaan keuangan yang teradministrasi | 100 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas barang milik daerah pada perangkat daerah | Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terfasilitasi | 95 % |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase administrasi kepegawaian yang terfasilitasi | 95 % |
| 5. | Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terfasilitasi | 94 % |
| 6. | Meningkatnya administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai RKBMD | 94 % |
| 7. | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 98 % |
| 8. | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai RKPBM | 93 % |

| No | Kegiatan | Anggaran | Ket. |
|-----|---|-------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Rp. 3.000.000 | DAU |
| 2. | Administrasi keuangan perangkat daerah | Rp. 2.772.943.000 | DAU |
| 3. | Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Rp. 0 | - |
| 4. | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Rp. 26.250.000 | DAU |
| 5. | Administrasi umum perangkat daerah | Rp. 80.071.900 | DAU |
| 6. | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Rp. 163.960.000 | DAU |
| 7. | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Rp. 290.600.150 | DAU |
| 8. | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Rp. 42.190.000 | DAU |

Tondano,

2025

KEPALA DPMPTSP,

SEKRETARIS,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

ALICE BARBARA LUMANAUW, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ONIKE TUMBELAKA, SE
Jabatan : KASUBBAG UMUM & PERLENGKAPAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALICE BARBARA LUMANAUW, SH
Jabatan : SEKRETARIS DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

ALICE BARBARA LUMANAUW, SH



PIHAK PERTAMA,

ONIKE TUMBELAKA, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | 1 Dok |
| 2. | Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 1 Lap |
| 3. | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 Lap |
| | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dok |
| 4. | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Paket |
| 5. | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Paket |
| 6. | Tersedianya peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 25 Paket |
| 7. | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 1 Paket |
| 8. | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket |
| 9. | Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 12 Lap |
| 10. | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Lap |
| 11. | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 12 Dok |
| 12. | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dok |
| 13. | Tersedianya mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 20 Unit |
| 14. | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 10 Unit |
| 15. | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit |
| 16. | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Lap |
| 17. | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Lap |
| 18. | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Lap |
| 19. | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit |

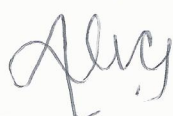
| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|---|-----------------|------------|
| 1. | Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Rp. 0 | - |
| 2. | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Rp. 0 | - |
| 3. | Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Rp. 0 | - |
| | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Rp. 0 | - |
| 4. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp. 0 | - |
| 5. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 22.100.000 | DAU |
| 6. | Penyediaan peralatan rumah tangga | Rp. 0 | - |
| 7. | Penyediaan bahan logistik kantor | Rp. 0 | - |
| 8. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp. 3.095.900 | DAU |
| 9. | Fasilitasi kunjungan tamu | Rp. 0 | - |
| 10. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Rp. 54.876.000 | DAU |
| 11. | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Rp. 0 | - |
| 12. | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Rp. 0 | - |
| 13. | Pengadaan mebel | Rp. 45.980.000 | DAU |
| 14. | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Rp. 117.980.000 | DAU |
| 15. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | |
| 16. | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp. 4.000.000 | DAU |
| 17. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp. 138.000.150 | DAU |
| 18. | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 0 | - |
| 19. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Rp. 42.190.000 | DAU |

Tondano,

2025

SEKRETARIS,

KASUBBAG UMUM & PERLENGKAPAN,



ALICE BARBARA LUMANAUW, SH



ONIKE TUMBELAKA, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEITY TAMBENGI, SE

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si



MEITY TAMBENGI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|---|--|---------------|
| 1. | Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai pegawai | 15 Unit |
| 2. | Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 96 Paket |
| 3. | Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 12 Dok |
| 4. | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | 2 Dok |
| 5. | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 2 Dok |
| 6. | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 5 Orang |
| 7. | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 50 Orang |
| 8. | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5 Orang |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|---|-----------------|------------|
| 1. | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Rp. 0 | - |
| 2. | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Rp. 26.250.000 | DAU |
| 3. | Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian | Rp. 0 | - |
| 4. | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Rp. 0 | - |
| 5. | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Rp. 0 | - |
| 6. | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Rp. 0 | - |
| 7. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Rp. 0 | - |
| 8. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Rp. 0 | - |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

MEITY TAMBENGI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEI LIANA DEWI, ST

Jabatan : Perencana Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

MEI LIANA DEWI, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|---|--|------------------|
| 1. | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 4 Dok |
| 2. | Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 Dok |
| 3. | Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 Dok |
| 4. | Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dok |
| 5. | Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dok |
| 6. | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 Lap |
| 7. | Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 2 Lap |
| 8. | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 25 Org/ bulan |
| 9. | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 2 Dok |
| 10. | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | 2 Dok |
| 11. | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Lap |
| 12. | Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | 1 Dok |
| 13. | Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 12 Lap |
| 14. | Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | 12 Dok |
| 15. | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Lap |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|---|-------------------|------------|
| 1. | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rp. 0 | - |
| 2. | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Rp. 500.000 | DAU |
| 3. | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Rp. 500.000 | DAU |
| 4. | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Rp. 500.000 | DAU |
| 5. | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Rp. 500.000 | DAU |
| 6. | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Rp. 500.000 | DAU |
| 7. | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Rp. 500.000 | DAU |
| 8. | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Rp. 2.772.943.000 | DAU |
| 9. | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD | Rp. 0 | - |
| 10. | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Rp. 0 | - |
| 11. | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Rp. 0 | - |
| 12. | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Rp. 0 | - |
| 13. | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | Rp. 0 | - |
| 14. | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Rp. 8 | DAU |
| 15. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Rp. 148.600.000 | DAU |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERENCANA MUDA,

MEI LIANA DEWI, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JESSY V. TIWANG, S.S. , M.E.

Jabatan : KABID PERENCANAAN & PENGEMBANGAN IKLIM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PIHAK PERTAMA,



JESSY V. TIWANG, S.S. , M.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Penetapan pemberian kebijakan fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota | 1 Dok |
| 2. | Tersedianya peta potensi investasi Kabupaten/Kota | Tersedianya peta potensi investasi Kabupaten/Kota | 1 Dok |
| 3. | Terfasilitasinya rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur | Tercapainya fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur | 100 % |
| 4. | Terfasilitasinya rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah Kabupaten/Kota | Tercapainya fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah Kabupaten/ Kota | 100 % |
| 5. | Terfasilitasinya kemitraan usaha nasional | Tercapainya jumlah kemitraan usaha nasional | 100 % |
| 6. | Terkoordinasinya pembentukan badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi pembentukan badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah Kabupaten/ Kota | 1 Keg |

| No (1) | Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Keterangan (4) |
|-----------|---|-----------------|-------------------|
| 1. | Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Rp. 0 | - |
| 2. | Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota | Rp. 138.050.200 | DAU |
| 3. | Fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur | Rp. 0 | - |
| 4. | Fasilitasi rencana hilirisasi investasi strategis di wilayah Kabupaten/Kota | Rp. 0 | - |
| 5. | Kemitraan usaha nasional | Rp. 0 | - |
| 6. | Koordinasi pembentukan badan usaha milik daerah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di wilayah Kabupaten/Kota. | Rp. 0 | - |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

KABID PERENCANAAN &
PENGEMBANGAN IKLIM,,

JESSY V. TIWANG, S.S., M.E.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebijakan Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|---|---|---------------|
| 1. | Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi | 1 Daerah |
| 2. | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dok |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|---|-----------------|------------|
| 1. | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | Rp. 0 | - |
| 2. | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Rp. 0 | - |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|---------------|
| 1. | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dok |
| 2. | Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 Dok |
| 3. | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dok |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--|-----------------|------------|
| 1. | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Rp. 0 | - |
| 2. | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Rp. 0 | - |
| 3. | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 138.050.200 | - |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|----------------|
| 1. | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 6 Dok |
| 2. | Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam | Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan | 10 Badan usaha |
| 3. | Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota | 10 Badan usaha |
| 4. | Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | 10 UMKM |
| 5. | Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Lap |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--|-----------------|------------|
| 1. | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp. 0 | - |
| 2. | Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam | Rp. 0 | - |
| 3. | Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota | Rp. 0 | - |
| 4. | Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar | Rp. 0 | - |
| 5. | Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota | Rp. 0 | - |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,



MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIANA RONDONUWU, SS
Jabatan : KABID PROMOSI & KERJASAMA PM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si



Pihak Pertama,

DIANA RONDONUWU, SS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | 3 Dok |

| No (1) | Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Keterangan (4) |
|-----------|---|-----------------|-------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Rp. 153.000.000 | DAU |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,



MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

KABID PROMOSI & KERJASAMA PM,



DIANA RONDONUWU, SS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MINTJE PALILINGAN, S.SOS

Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PIHAK PERTAMA,

MINTJE PALILINGAN, S.SOS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/ Kota | 1 dok |

| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Ket |
|-----|---|----------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota | Rp. 25.000.000 | DAU |

Tondano,


2025

KEPALA DINAS,



MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,



MINTJE PALILINGAN, S.SOS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELFIE B. GIMON, SIP

Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si


SELFIE B. GIMON, SIP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|---------------|
| 1. | Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/ Kota | Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/ Kota | 3 dok |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--|-----------------|------------|
| 1. | Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten / Kota | Rp. 128.000.000 | DAU |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,



MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,



SELFIE B. GIMON, SIP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|----------------------|-------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |

| No | Sub Kegiatan | Anggaran | Ket |
|-----|--------------|----------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | Rp. 0 | - |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,



MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : KABID PENGENDALIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|---------------|
| 1. | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah | 3 Lap |


| No (1) | Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Keterangan (4) |
|-----------|---|-----------------|-------------------|
| 1. | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 333.992.650 | DAK |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

KABID PENGENDALIAN,


MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARGE AUDY MASSIE, SIP
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si



ARGE AUDY MASSIE, SIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|---|---------------|
| 1. | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 12 Keg Usaha |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Keterangan (4) |
|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Pengawasan Penanaman Modal | Rp. 102.250.000 | DAK |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

ARGE AUDY MASSIE, SIP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|--|------------------|
| 1. | Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | Terselesaikannya permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya | 8 Kegiatan usaha |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--|-----------------|------------|
| 1. | Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya | Rp. 80.900.000 | DAK |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|--|------------------|
| 1. | Terlaksananya bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risikodan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko | 205 Pelaku usaha |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Bimbingan teknis kepada pelaku usaha | Rp. 150.842.650 | DAK |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,



MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTOR I. TAMBARIKI, SIP
Jabatan : KABID PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Pihak Pertama,



VICTOR I. TAMBARIKI, SIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|--|---------------|
| 1. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota | 3 Laporan |
| 2. | Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan |

| No (1) | Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|---|-----------------|------------|
| 1. | Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 7.437.000 | DAU |
| 2. | Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.311.000 | DAU |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

KABID PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

VICTOR I. TAMBARIKI, SIP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROYKE O. LOMBOAN, SIP

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

ROYKE O. LOMBOAN, SIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|---|---|----------------------------|
| 1. | Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | 1000 Orang/Pelaku Usaha |
| 2. | Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha | Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha | 120 Kegiatan Usaha |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--|-----------------|------------|
| 1. | Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | Rp. 0 | - |
| 2. | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Rp. 7.437.000 | DAU |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

ROYKE O. LOMBOAN, SIP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORTJE L. WEKU, SH

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si



NORTJE L. WEKU, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|---|--|---------------|
| 1. | Tersedianya data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | 16 Dokumen |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--|-----------------|------------|
| 1. | Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Rp. 5.311.000 | DAU |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

NORTJE L. WEKU, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SILVIA N. WALALANGI, S.SOS

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2025

Pihak Kedua,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

Pihak Pertama,



SILVIA N. WALALANGI, S.SOS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

| NO. (1) | Sasaran Sub Kegiatan (2) | Indikator Kinerja (3) | Target (4) |
|------------|--|--|------------------------------|
| 1. | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penentapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Investor |
| 2. | Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik | 50 Orang/ Pelaku Usaha |

| No (1) | Sub Kegiatan (2) | Anggaran (3) | Ket (4) |
|-----------|--|-----------------|------------|
| 1. | Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah | Rp. 0 | - |
| 2 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Rp. 0 | - |

Tondano,

2025

KEPALA DINAS,

MEKRY J. SONDEY, S.E., M.Si

ANALIS KEBIJAKAN MUDA,

SILVIA N. WALALANGI, S.SOS